

Analisis Efisiensi Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Analysis Of Capital Expenditure Efficiency in Public Works and Parepare City Spatial Planning

SUTRIANI

EMAIL: Sutrisutriani7@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques in this study use efficiency ratio formula. Capital Expenditures are regional government expenditures whose benefits exceed one fiscal year and will increase regional assets or wealth and subsequently will add routine expenditure such as maintenance costs to general administration expenditure groups according to PP No. 71 of 2010. The results of the study that Capital Expenditures from 2013-2017 have been in efficient criteria. Where in 2013 it was categorized as efficient, in 2014, 2016, 2017 was categorized as quite efficient, and in 2015 it was categorized as very efficient.

Keywords: Efficiency, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyalenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut.

Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 36).

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 37). Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal (Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 51).

Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.03 PSAP 02 Halaman 8 Baris 5 Paragraf 37 didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2016:155) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan. Adapun Rumusan masalah yaitu : Bagaimana tingkat efisiensi belanja modal pada tahun 2013-2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare?

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Ganggawa No.12, Mallusetasi, Ujung Parepare, Sulawesi Selatan.

B. Defenisi Operasional

1. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
2. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi

1. Teknik Observasi, observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau secara langsung dengan pihak yang berkompeten untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Teknik Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Metode penelitian deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono (2013), penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka. Penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif mampu memberikan gambaran melalui perhitungan dari data-data yang diperoleh mengenai efektivitas dan efisiensi Belanja Modal.

2. Sumber Data

- a. *Person* (Individu), yaitu data yang diperoleh dari Intansi Pemerintah melalui wawancara langsung dari pimpinan maupun staf yang dianggap berkompeten.
- b. *Paper* (*Catatan tertulis*), yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumen terkait terutama dengan variabel yang diteliti.
- c. *Place* (*tempat*), yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

E. Teknik Analisis Data

Mahmudi (2016) Rasio Efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat pengamatan anggaran yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi modal belanja dirumuskan :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, Kriteria tingkat efisiensi Anggaran Belanja adalah sebagai berikut :

1. Jika Hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.6

Total Anggaran Belanja Modal dan Realisasi Belanja Modal

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal
2013	Rp 57.317.865.505	Rp 36.100.029.915
2014	Rp 55.793.359.645	Rp 47.969.884.145
2015	Rp 115.750.644.775	Rp 59.528.177.425
2016	Rp 195.193.384.950	Rp 122.000.753.283
2017	Rp 168.561.396.065	Rp 137.220.725.673

SumberData : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Tabel 5.7

Hasil Perhitungan Efisiensi

Tahun	Hasil Presentase	Kategori
2013	62,98%	Efisien
2014	85,97%	Cukup Efisien
2015	51,42%	Sangat Efisien
2016	62,50%	Cukup Efisien
2017	81,40%	Cukup Efisien
Rata-rata	68,85%	Efisien

Sumber Data : Hasil Olah Data Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare diperoleh hasil penelitian dari tahun 2013-2017 yaitu Rata-rata tingkat efisiennya adalah 68,85% dengan kriteria Efisien.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Analisis efisiensi tersebut yang menunjukkan angka 62,98%, maka dapat disimpulkan bahwa kategori efisiensi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare untuk tahun 2013 adalah Efisien. Sementara itu hasil perhitungan analisis efisiensi tahun 2014 menunjukkan angka 85,97% atau Cukup Efisien.

Hasil perhitungan analisis efisiensi tahun 2015 menunjukkan angka 51,42% sehingga kategori efisiensi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare adalah sangat efisiensi. Sementara itu hasil perhitungan analisis efisiensi tahun 2016 menunjukkan angka 62,50% atau Cukup Efisien. Berdasarkan hasil perhitungan analisis efisiensi tahun 2017 menunjukkan angka 81,40% maka efisiensi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare Cukup Efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efisiensi Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Rasio Efisiensi Belanja Modal diperoleh hasil rata-rata sebesar 68,85% dengan penilaian kriteria efisien yaitu efisien. Namun berdasarkan Hasil perhitungan dari tahun 2013-2017 memiliki kriteria yang bervariasi. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi sebesar 62,98% masuk kriteria efisien, dan pada tahun 2014 tingkat efisiennya 85,97% dengan kriteria Cukup Efisien, pada tahun 2015 tingkat efisiennya 51,42% dengan kriteria Sangat Efisien, dan tahun berikutnya 2016 tingkat efisiennya 62,50% dengan Kriteria Cukup Efisien, dan tahun 2017 tingkat efisiennya 81,40% dengan kriteria Cukup efisien.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk Efisiensi Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mempertahankan tingkat efisiensi bahkan lebih ditingkatkan agar tingkat efisiennya berada dalam kriteria sangat efisien.
2. Kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama agar mengembangkan ruang lingkup penelitian tidak hanya pada Belanja Modal tetapi bisa juga diangkat Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat: Jakarta.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.

Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah.

Rusita Untari. 2014. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro